

## **PENCEGAHAN JUDI ONLINE OLEH PEMERINTAH DESA KARANGKAMIRI KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN**

**Asep Rendi Fadilah<sup>1</sup>, Aan Anwar Sihabudin<sup>2</sup>, Asep Nurwanda<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1)2)3)</sup>*

e-mail: [asep.rendi@gmail.com](mailto:asep.rendi@gmail.com)

Submitted: 10-09-2025, Reviewed: 15-09-2025, Published: 29-09-2025

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah Desa terhadap pencegahan judi online di kalangan Masyarakat Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif, kualitatif ini merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan kejadian fenomena keadaan sesungguhnya. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat, memahami dan menganalisis bagaimana peran Pemerintah Desa terhadap pencegahan judi online di kalangan Masyarakat Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.*

**Kata Kunci:** *Peran, Pemerintah Desa, Pencegahan, Judi Online*

### **PENDAHULUAN**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini, telah membawa berbagai dampak dan perubahan dalam kehidupan manusia, Globalisasi sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, kemudahan untuk berkomunikasi jarak jauh dapat dilakukan dengan mudah sejak munculnya teknologi komunikasi yang lebih modern.

Selain berdampak positif, tentunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia, khusus nya kaum remaja yang belum mampu menyaring segala macam bentuk arus globalisasi terutama penggunaan internet. Internet yang diharapkan dapat membantu dalam memudahkan segala macam kegiatan dan pekerjaan justru disalahgunakan penggunaannya oleh kaum remaja. Para pengguna internet justru dapat membuat berbagai macam kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Dengan kreatifitas yang tinggi dan penggunaan metode-metode yang canggih, para pengakses internet akhirnya dapat menciptakan berbagai macam situs permainan elektronik atau yang

sering disebut game online. Situs-situs tersebut dapat dengan mudahnya diakses oleh seluruh pengguna internet. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini permainan elektronik atau yang kita sebut game online telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Game online tidak hanya menjamur di kota-kota besar, tetapi juga telah merambah kota-kota kecil dan desa-desa. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah game center yang muncul dan pelanggan yang seringkali dijumpai adalah kaum remaja, terutama laki-laki yang berusia sekitar 15-21 tahun. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, game online yang pada awalnya hanya berupa permainan saja, kemudian dikembangkan kembali menjadi sebuah media permainan yang dapat menghasilkan uang atau yang sering disebut perjudian online.

Permainan judi pada hakekatnya merusak mental para pelakunya, dan juga merusak perekonomian keluarga. Permainan judi dapat membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku perjudian tersebut kalah dalam pertaruhan, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi hingga uang dan harta bendanya habis seluruhnya karena permainan judi tersebut. Pada akhirnya para pelaku perjudian tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan taruhan dalam permainan judi tersebut dengan cara-cara melawan hukum seperti misalnya, mencuri, merampok, menipu, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu perekonomian keluarga juga menjadi merosot tajam, sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di samping itu, perjudian yang dilakukan secara online di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni, Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. (sumber UU ITE dan UU perjudian).

Peran Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pencegahan judi online dengan menggalakkan kesadaran masyarakat, bekerja sama dengan Masyarakat atau organisasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas ilegal, serta menyelenggarakan program edukasi tentang dampak negatif judi online.

Karangkamiri merupakan sebuah Desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, dan Desa Karangkamiri seperti desa di Indonesia

lainnya, dimana desa ini adalah unit administratif tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan daerah. Umumnya, desa adalah pemukiman di daerah pedesaan yang terdiri dari komunitas warga yang hidup bersama dalam satu wilayah. Desa Karangkamiri, seperti desa-desa lainnya, memiliki pemerintah desa yang bertugas mengelola urusan lokal, memajukan pembangunan, serta menjaga ketentraman dan kesejahteraan warganya.

Namun, di tengah perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin meluas, muncul penyimpangan yang signifikan, seperti perjudian online ilegal. Penyimpangan ini seringkali merusak tatanan sosial desa. Perjudian online dapat menciptakan kecanduan, konflik dalam keluarga, dan masalah keuangan yang serius. Terlebih lagi, hal ini juga dapat menyebabkan berbagai bentuk tindak kriminal, termasuk penipuan dan pencucian uang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa, bersama dengan pihak berwenang lainnya, untuk mengambil tindakan yang tegas guna memitigasi dampak negatif dari perjudian online ilegal di Desa Karangkamiri.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa Pemerintah Desa dalam melakukan upaya pencegahan judi online di Desa Karangkamiri belum optimal hal tersebut di sebabkan indikator permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Belum adanya praturan atau regulasi pencegahan judi online di desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangnadaran.
2. Perlunya pemberdayaan masyarakat Desa Karangkamiri untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalm pencegahan judi online.
3. Belum adanya komunikasi yang di bangun antara Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa Karangkamiri dalam pencegahan judi online.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian ini diawali dengan adanya permasalahan sosial yang dimana permasalahan tersebut berfokus pada perjudian atau judi online, minimnya kepedulian pemerintah Desa dalam menangani permasalahan sosial tersebut mengakibatkan permasalahan tersebut semakin kompleks di kalangan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan menurut Widjaja dalam buku *Otomi Desa* nya menyatakan Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang – barang publik termasuk melakukan pungutan pajak pada masyarakat. Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja

politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Agar dapat mengetahui perspektif Peran Pemerintah Desa dalam pencegahan judi online di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran dapat dianalisis pencegahan judi online dengan peneliti menggunakan pendapat dari Covey dalam (Zainal, 2014:156) tentang peran yang mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. “Pathfinding (Pencarian alur); peran untuk menentukan visi dan misi yang pasti.
2. Aligning (Penyelaras); peran untuk memastikan bahwa struktur, sistem dan proses operasional organisasi memberikan dukungan pada pencapaian visi dan misi.
3. Empowering (Pemberdaya); peran untuk menggerakkan semangat dalam diri orang-orang dalam mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati”.

## **METODE**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif menurut Sugiyono (2014:9) adalah Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat Desa sebanyak 2 orang, masyarakat sebanyak 4 orang sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Ahmadi (2002) dalam Yare (2021:20) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), Yare (2021:20), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Karangkamiri merupakan sebuah Desa di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, dan Desa Karangkamiri seperti desa di Indonesia lainnya, dimana desa ini adalah unit administratif tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan daerah. Umumnya, desa adalah pemukiman di daerah pedesaan yang terdiri dari komunitas warga yang hidup bersama dalam satu wilayah. Desa Karangkamiri, seperti desa-desa lainnya, memiliki pemerintah desa yang bertugas mengelola urusan lokal, memajukan pembangunan, serta menjaga ketentraman dan kesejahteraan warganya.

Namun, di tengah perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin meluas, muncul penyimpangan yang signifikan, seperti perjudian online ilegal. Penyimpangan ini seringkali merusak tatanan sosial desa. Perjudian online dapat menciptakan kecanduan, konflik dalam keluarga, dan masalah keuangan yang serius. Terlebih lagi, hal ini juga dapat menyebabkan berbagai bentuk tindak kriminal, termasuk penipuan dan pencucian uang. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah desa Karangkamiri, bersama dengan pihak berwenang lainnya, untuk mengambil tindakan yang tegas guna memitigasi dampak negatif dari perjudian online ilegal di Desa Karangkamiri.

Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Judi Online Di Desa Karangkamiri Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, penulis melakukan penelitian kelapangan melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan mengacu pada konsep Peran yang dikemukakan oleh Covey dalam (Zainal, 2014:156) yaitu sebagai berikut:

1. *Pathfinding* (Pencarian alur);
2. *Aligning* (Penyelaras); dan
3. *Epowering* (Pemberdaya).

Adapun dimensi-dimensi tersebut dapat di uraikan kedalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. *Pathfinding* (Pencarian alur)

Pencarian alur merupakan suatu peran yang harus dimainkan oleh pemimpin dalam rangka menentukan visi dan misi bagi organisasinya untuk menggiring akitfitas organisasi pada fokus yang sama. Pengertian lain dari Pencarian alur itu sendiri, adalah upaya untuk menggali dan memahami urutan peristiwa yang membentuk struktur dasar suatu cerita. Ini melibatkan penelusuran detail-detail cerita, karakter-karakter, konflik, dan tema-tema yang muncul dalam narasi tersebut. Proses pencarian alur ini memungkinkan pembaca untuk merasakan arus cerita secara lebih mendalam, memahami bagaimana setiap elemen berkaitan satu sama lain, dan bagaimana mereka berkembang seiring dengan berjalannya waktu dalam (Rivai Zainal, 2014).

Hasil wawancara dapat diuraikan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Adanya program pemberdayaan oleh pemerintah desa terhadap Masyarakat khususnya pelaku Judi Online.

Pemberdayaan adalah proses atau upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri individu atau kelompok masyarakat, sehingga mereka mampu mengambil peran aktif dalam pembangunan diri dan masyarakat serta mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Ini bisa melibatkan pendidikan, pelatihan, akses terhadap sumber daya, penguatan kapasitas, dan memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan.

Tujuan pemberdayaan pemerintah desa terhadap masyarakat pelaku judi online sangat beragam, namun secara umum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, pemerintah desa bertujuan untuk mencegah dan mengurangi praktik perjudian online dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi negatif yang mungkin timbul. Selanjutnya, upaya tersebut juga ditujukan untuk mengubah perilaku para pelaku judi online dengan menginspirasi mereka untuk meninggalkan kebiasaan tersebut dan mengalihkan fokus mereka ke aktivitas yang lebih produktif dan positif.

Selain itu, pemerintah desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat judi online dengan memberikan dukungan dalam pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan pemberdayaan juga mencakup upaya untuk mencegah dampak sosial negatif yang seringkali terkait dengan perjudian online, seperti masalah keuangan, kerusakan hubungan, dan gangguan kesehatan mental.

Terakhir, pemerintah desa berusaha untuk memperkuat komunitas dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian online. Melalui keterlibatan aktif ini, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih sehat dan tangguh secara sosial, di mana masyarakat dapat saling mendukung dan bekerja sama untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks seperti perjudian online.

Untuk mengetahui bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan program pemberdayaan yang ditujukan khusus kepada para pelaku judi online dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif perjudian online dan membantu para pelaku untuk beralih ke aktivitas yang lebih produktif. Namun, dalam pelaksanaannya, mungkin ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti resistensi dari para pelaku judi online, kurangnya sumber daya, atau bahkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan bahaya judi online.



Berdasarkan wawancara di atas bahwa upaya dalam pencegahan masalah judi online di Desa Karangkamiri sudah ada seperti melakukan edukasi dan pembinaan. Namun untuk mencapai hasil yang lebih efektif diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah Desa dengan masyarakat serta keluarga. Edukasi yang kerap dilakukan dengan membahas informasi tentang dampak negatif dari judi online baik dari segi finansial, psikologis, maupun sosial. Selain itu pembinaan seperti ruqyah yang berkelanjutan dan bagi mereka yang sudah terjerat judi online sangat penting.

Dan hambatan yang di hadapi pemerintah Desa dalam menangani judi online ini yaitu kurangnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap situs-situs judi online yang beroperasi secara ilegal, yang di tambah tidak ada nya penguat regulasi yang khusus untuk menangani hal tersebut di dalam Pemerintahan Desa sangat menghambat program pemberdayaan tersebut.

Untuk menanggapi hambatan tentang pencegahan dan pemberdayaan terhadap judi online oleh pemerintah desa Karangkamiri maka pemerintah desa Karangkamiri melakukan upaya-upaya dengan mengambil langkah-langkah strategis, Salah satu langkah konkret yang sedang direncanakan adalah penyusunan peraturan yang lebih komprehensif untuk mengatur dan mengawasi aktivitas judi online di wilayah mereka. Dengan adanya peraturan yang lebih ketat dan terperinci ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi masalah judi online di Desa Karangkamiri. Langkah ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perjudian online, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar dapat menjaga ketertiban dan kesejahteraan bersama.

b. Adanya sinergitas antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat.

Sinergitas mengacu pada konsep di mana kerja sama antara dua entitas atau lebih menghasilkan hasil yang lebih besar daripada yang dapat dicapai jika setiap entitas bekerja sendiri. Dalam sinergitas, kolaborasi antara berbagai pihak menghasilkan efek yang lebih besar daripada jumlah kontribusi individu mereka. Ini mencerminkan ide bahwa kerjasama dan integrasi berbagai kekuatan dan sumber daya dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan. Sinergitas dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan antara individu, organisasi, atau bahkan dalam proses atau sistem yang kompleks.

Sinergitas antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat mengacu pada kerja sama yang erat dan saling mendukung antara pemerintah desa dan berbagai kelompok masyarakat di wilayah desa Karangkamiri. Ini mencakup kolaborasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan, program, dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergitas ini mencerminkan keterlibatan aktif dan partisipasi kedua belah pihak dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal, serta dalam mengatasi

masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Sinergitas antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat seringkali diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Untuk mengetahui bahwa terdapat kerja sama yang erat antara pemerintah desa dan kelompok masyarakat di desa Karangkamiri dalam penanganan masalah judi online. Kerja sama ini melibatkan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah desa dan berbagai kelompok masyarakat, seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mengambil langkah-langkah bersama dalam pencegahan dan penanggulangan judi online di desa tersebut.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa informan dari pihak pemerintah Desa menyatakan sinergitas antara pemerintah desa dengan tokoh masyarakat sudah terjalin salah satunya dengan MUI, namun pihak pemerintah desa mengatakan bahwa hal tersebut belum menjadi solusi yang kuat untuk pencegahan judi online di desa Karangkamiri karena jika website atau aplikasi nya belum di tutup posisi pemerintah desa masih kesulitan dalam menangani nya.

Untuk infoman di bagian pihak masyarakat sebagian besar belum mengetahui adanya sinergitas antara Pemerintah Desa dengan Tokoh Masyarakat, mungkin hal tersebut di karenakan kurangnya masalah transparansi atau informasi dalam penanganan judi online.

Dari pernyataan di atas dapat penulis sampaikan bahwa langkah sinergitas antara pemerintah desa dengan tokoh masyarakat dalam pencegahan judi online sudah ada namun hal tersebut belum cukup mengatasi judi online di desa Karangkamiri, Karena langkah langkah yang di ambil tersebut belum cukup kuat untuk menjadi sebuah solusi.

#### 1. *Aligning* (Penyelaras)

*Aligning* (Penyelaras) peran yang harus dijalankan untuk memastikan bahwa sistem dan proses oprasional organisasi telah sesuai, mendukung terhadap tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan mengintegrasikan berbagai fungsi dan kegiatan di seluruh departemen. Penyelaras bertanggung jawab untuk mengoordinasikan tindakan-tindakan yang diperlukan agar semua bagian organisasi bekerja secara sinergis dan harmonis. Ini termasuk mengidentifikasi potensi hambatan, mengembangkan strategi untuk mengatasinya, serta memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan digunakan secara efektif. Selain itu, Penyelaras harus mengawasi pelaksanaan rencana operasional, memonitor kinerja, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk tetap berada di jalur yang benar menuju pencapaian tujuan organisasi

Dalam ruang lingkup pemerintah desa, Penyelaras bertanggung jawab untuk memastikan semua sistem dan proses operasional mendukung tercapainya visi dan



misi desa dengan mengoordinasikan berbagai fungsi dan kegiatan perangkat desa. Tugas utama Penyelaras meliputi koordinasi kegiatan desa, identifikasi dan penyelesaian hambatan, pengelolaan sumber daya, pemantauan dan evaluasi kinerja, menjaga komunikasi efektif, serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan perangkat desa. Selain itu, Penyelaras juga memfasilitasi penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional desa. Dengan menjalankan peran ini, Penyelaras berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan responsif, mendukung tercapainya visi dan misi desa, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga desa.

Hasil wawancara dapat diuraikan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Adanya dukungan Pemerintah desa terhadap kegiatan

Dukungan pemerintah merujuk pada berbagai tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan bantuan, bimbingan, atau sumber daya kepada individu, kelompok, atau sektor tertentu dalam masyarakat. Dukungan pemerintah dapat berupa dukungan finansial, kebijakan, layanan publik, insentif pajak, pelatihan, infrastruktur, atau peraturan yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu. Tujuan dari dukungan pemerintah bisa bermacam-macam, termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, memperbaiki infrastruktur, menjaga keamanan dan ketertiban, atau melindungi hak dan kepentingan warga negara.

Untuk mengetahui bahwa Pemerintah desa Karangkamiri memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang dilaksanakan di wilayahnya. Dukungan ini bisa berupa bantuan dalam bentuk fasilitas, alokasi dana, izin, atau bantuan teknis lainnya yang diperlukan untuk kelancaran dan kesuksesan kegiatan tersebut. Dukungan ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam memajukan dan mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memberikan dukungan terhadap kegiatan pencegahan judi online. Hal ini menunjukkan konsensus di antara mereka mengenai pentingnya peran pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut, dukungan pemerintah desa ini dapat berupa berbagai bentuk, seperti penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya judi online, pembentukan kegiatan sosial atau olahraga yang mengalihkan perhatian dari perjudian online, atau bahkan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas perjudian di wilayah desa. Kesadaran akan pentingnya peran pemerintah desa dalam pencegahan judi online menunjukkan upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.

b. Adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat.

Kerjasama antara pemerintah desa dengan kelompok masyarakat adalah kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan program sosial, pengelolaan sumber daya alam, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan partisipasi aktif dari warga dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program yang berdampak pada kehidupan mereka. Kerjasama semacam itu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan.

Untuk mengetahui bahwa terdapat kerjasama yang terjalin antara pemerintah desa Karangkamiri dengan berbagai kelompok masyarakat dalam upaya pencegahan judi online. Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh masyarakat, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, serta individu-individu yang peduli terhadap masalah judi online di desa tersebut. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah penyebaran judi online dan mengurangi dampak negatifnya bagi masyarakat setempat. Kerjasama ini mencerminkan komitmen bersama dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks dan merugikan tersebut.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa seluruh informan menyatakan bahwa belum adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pencegahan judi online di desa Karangkamiri, penulis menyimpulkan bahwa masalah belum adanya kerjasama sama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pencegahan judi online ini mungkin karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan dampak negatif dari judi online di kalangan masyarakat. Jika masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahaya yang ditimbulkan oleh judi online, mereka mungkin tidak akan merasa perlu untuk aktif terlibat dalam upaya pencegahannya.

Selain itu, mungkin juga terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai strategi yang efektif dalam mengatasi masalah judi online, jika pemerintah desa tidak secara jelas mengkomunikasikan rencana dan langkah-langkah konkret yang akan diambil, masyarakat mungkin akan merasa tidak termotivasi untuk berpartisipasi. Selanjutnya kurangnya sumber daya, baik itu dalam hal keuangan maupun tenaga kerja juga dapat menjadi hambatan dalam membangun kerjasama yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Tanpa dukungan yang memadai program pencegahan judi online mungkin akan terhambat dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Selain itu, perbedaan pandangan atau kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat juga bisa menjadi penghalang dalam membangun kerjasama yang solid, misalnya mungkin terdapat perbedaan prioritas antara pemerintah desa yang lebih

fokus pada pembangunan infrastruktur dan masyarakat yang lebih prihatin akan masalah sosial seperti judi online.

Dukungan dan kerjasama dalam melakukan pencegahan judi online sejalan dengan salah satu terori Dukungan yang di kemukakan oleh Notoatmodjo (2003) "Dukungan adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang baik itu moril maupun material untuk memotivasi orang lain dalam melaksanakan suatu kegiatan". Dan teori kerjasama yang di kemukakan oleh Landsberger (2011) "Kerjasama atau belajar bersama adalah proses berkelompok dimana anggota- anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat".

Secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah belum adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pencegahan judi online, diperlukan langkah-langkah yang menyeluruh dan kolaboratif. Ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, komunikasi yang efektif dari pemerintah desa, alokasi sumber daya yang memadai, serta penyesuaian prioritas dan kepentingan antara kedua belah pihak.

## 2. *Epowering* (Pemberdaya)

Berdasarkan *Empowering* (Pemberdaya) Peran untuk menggarakkan semangat dalam diri orang-orang yang dipimpinnya, memaksimalkan potensi, kreatifitas laten yang dimiliki bawahannya untuk dapat mengerjakan tugas-tugas manajerialnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Teori yang dikemukakan oleh Covey di atas, telah mengakomodir dua aspek kepemimpinan, yaitu leadership dan manajerial. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemimpin yang dapat menjalankan peran sebagaimana di atas, maka efekfitas sistem kepemimpinannya dapat terwujud. Kepastian akan terwujudnya sistem kepemimpinan ini harus diimbangi dengan kepribadian pemimpin yang secara instingtif dapat memberikan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat pada kondisi-kondisi tertentu. (Agus readi dkk, 2022).

Dalam konteks peran pemerintah desa dalam menangani judi online, konsep pemberdayaan atau *empowering* memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah desa yang efektif dalam menangani masalah ini akan menggerakkan semangat masyarakat yang dipimpinnya untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan judi online.

Pemberdayaan dalam hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi dan kreativitas masyarakat desa untuk mengembangkan strategi dan program-program yang sesuai dengan kondisi lokal dan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Misalnya, pemerintah desa dapat mengadakan pertemuan atau lokakarya dengan masyarakat untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam melawan judi online, termasuk dalam hal pendidikan tentang risiko dan dampak negatifnya.

Hasil wawancara dapat diuraikan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Adanya pemberdaya atau sosialisasi untuk para pelaku judi online

Pemberdayaan mengacu pada proses atau upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya dan memecahkan masalah mereka sendiri. Ini melibatkan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan mereka sendiri. Pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu dan kelompok untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka sendiri.

Sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian individu dengan norma-norma, nilai-nilai, budaya, dan perilaku yang dianut oleh masyarakat tempat individu tersebut tinggal. Ini melibatkan interaksi dengan anggota masyarakat lainnya, termasuk keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lembaga sosial lainnya, untuk mempelajari cara-cara berperilaku yang diterima dan diharapkan dalam suatu kelompok sosial. Sosialisasi membantu membentuk identitas dan kepribadian seseorang serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat secara efektif.

Untuk mengetahui apakah adanya upaya pemberdayaan atau sosialisasi yang ditujukan khusus kepada para pelaku judi online di Desa Karangkamiri, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran. Upaya tersebut dapat berupa program-program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi negatif dari praktik perjudian online, serta memberikan alternatif yang lebih produktif dan berkelanjutan bagi mereka. Melalui pemberdayaan atau sosialisasi ini, diharapkan para pelaku judi online dapat meninggalkan kebiasaan tersebut dan beralih ke aktivitas yang lebih positif dan mendukung kesejahteraan mereka serta masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara di atas sepakat bahwa pemberdaya atau sosialisasi untuk para pelaku judi online sudah ada, namun penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa harus lebih fokus dalam menjalankan program sosialisasi atau pemberdaya dalam menangani judi online di desa Karangkamiri, Dalam konteks ini meskipun ada kesepakatan bahwa upaya pemberdayaan dan sosialisasi terhadap pelaku judi online sudah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa perlu lebih memfokuskan upaya mereka dalam menjalankan program tersebut. Hal ini mengingat pentingnya peran pemerintah desa sebagai pemimpin dan fasilitator dalam menangani masalah sosial seperti judi online.

Dengan fokus yang lebih, pemerintah desa dapat meningkatkan efektivitas program-program pemberdayaan dan sosialisasi. Mereka dapat mengembangkan

strategi yang lebih komprehensif, melibatkan lebih banyak stakeholder, serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung keberhasilan program-program tersebut. Selain itu, perlu juga adanya evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program yang telah dijalankan, serta keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses tersebut. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memastikan bahwa upaya mereka dalam menangani judi online benar-benar memberikan dampak yang positif dan signifikan bagi masyarakat Desa Karangkamiri.

- b. Adanya arahan atau bimbingan dari pemerintah desa dalam pemberdayaan Masyarakat khusus nya pelaku Judi Online.

Arahan atau bimbingan adalah proses memberikan petunjuk, nasihat, dan bantuan kepada seseorang untuk membantu mereka mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu. Ini melibatkan pengarahan individu dalam menjalankan tugas atau mengambil keputusan dengan memberikan informasi, saran, atau panduan yang relevan. Arahan atau bimbingan sering dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang lebih dalam bidang yang bersangkutan, dengan tujuan membantu individu mencapai potensi mereka yang maksimal atau mengatasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi.

Di Desa Karangkamiri, seperti di banyak tempat lainnya, arahan atau bimbingan bagi para penjudi online memegang peran penting dalam upaya pencegahan judi online di desa Karangkamiri. Bimbingan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi dari judi online, tetapi juga menekankan pentingnya bermain dengan bertanggung jawab. Melalui bimbingan, individu dapat memperoleh dukungan emosional untuk mengatasi stres dan tekanan yang terkait dengan perjudian, serta memperoleh motivasi untuk berubah. Selain itu, bimbingan juga memberikan alternatif positif dengan mengarahkan perhatian individu ke kegiatan dan minat lain yang bermanfaat. Di samping itu, bimbingan membantu dalam pengembangan keterampilan praktis, seperti pengelolaan uang dengan bijak dan mengatasi godaan judi. Dengan adanya arahan atau bimbingan, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif judi online dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengetahui apakah pemerintah desa Karangkamiri memberikan arahan atau bimbingan kepada masyarakat, khususnya para pelaku judi online, dalam rangka pemberdayaan. Arahan atau bimbingan tersebut mungkin mencakup penyuluhan tentang bahaya dan konsekuensi negatif dari perjudian online, bantuan dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah perjudian, dan pembinaan untuk membantu para pelaku judi online memulai atau mengembangkan keterampilan serta mata pencaharian yang lebih positif dan legal. Dengan adanya arahan atau bimbingan ini, diharapkan para pelaku judi online dapat mengubah perilaku mereka menuju arah yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa seluruh informan menyatakan bahwa arahan atau bimbingan dari pihak pemerintah desa dalam pemberdaya Masyarakat husus nya pelaku judi online semua nya sepakat ada, namun penulis berkesimpulan bahwa arahan atau bimbingan yang di lakukan oleh pemerintah desa masih kurang di fokus kan lagi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan kedalaman arahan yang diberikan, serta perlunya lebih banyak upaya untuk memperkuat fokus dan kegiatan yang terkait dengan penanggulangan permasalahan judi online di tingkat desa.

Dalam konteks ini, dapat diasumsikan bahwa meskipun adanya kesadaran dan upaya dari pemerintah desa, masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal penekanan pada strategi yang tepat, alokasi sumber daya yang memadai, dan penerapan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan judi online secara efektif. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa perlu ada penyesuaian dalam pendekatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam menangani masalah ini secara menyeluruh.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Karangkamiri dalam pencegahan judi online telah berjalan, meskipun masih belum optimal. Upaya pencegahan telah dilakukan dan menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya penanganan masalah judi online di tingkat lokal. Namun, efektivitasnya belum maksimal karena adanya keterbatasan sumber daya, minimnya pemahaman mengenai kompleksitas judi online, serta tantangan perkembangan teknologi yang mempermudah akses masyarakat pada aktivitas tersebut.

Sejalan dengan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Desa Karangkamiri meningkatkan efektivitas peran dalam pencegahan judi online melalui evaluasi berkelanjutan, peningkatan sinergi dengan masyarakat dan pihak ketiga, serta penguatan sosialisasi mengenai risiko judi online. Pemerintah Desa juga perlu lebih sering mengadakan musyawarah evaluasi dan dialog dengan pemangku kepentingan guna meminimalisasi hambatan dan miskomunikasi. Selain itu, penyampaian informasi yang jelas dan terbuka dalam setiap rapat koordinasi perlu ditingkatkan agar tujuan dan langkah pencegahan dapat dipahami dan didukung oleh seluruh pihak. Dengan upaya terpadu tersebut, diharapkan pencegahan judi online dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan desa yang lebih aman serta produktif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Rineka cipta. Jakarta.



Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Zainal. Arifin. 2014. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Agus readi dkk, 2022. *Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan melalui program bank sampah gomi di kelurahan mijen kota semarang*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 8, No. 1 (January –June 2022)

Yare, M. (2021). *Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor*. Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, 3(2), 17-28.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.